

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011 – 2015**

(Skripsi)

Oleh

**IMAN FIRMANSYAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING REGIONAL AUTONOMY IN LAMPUNG YEAR 2011 – 2015**

**By  
IMAN FIRMANSYAH**

The purpose of this research is to analyze of factors affecting regional autonomy in Lampung Year 2011 – 2015. The factors as independent variabels consist of liquidity, leverage, size of local government, and wealth. Regional autonomy as dependent variabel is measured by independence ratios.

By using multiple regression analysis on 65 samples, the result show liquidity, leverage, size of local government, and wealth have positive and significant effect on the regional autonomy.

**Keywords: Regional autonomy, liquidity, leverage, size of local government, wealth**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011 – 2015**

**Oleh  
IMAN FIRMANSYAH**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 – 2015. Faktor-faktor yang diteliti sebagai variabel independen pada penelitian ini adalah *likuiditas*, *leverage*, ukuran, dan kemakmuran. Kemandirian daerah sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan rasio kemandirian.

Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda terhadap 65 sampel penelitian, hasil pengujian menunjukkan bahwa *likuiditas*, *leverage*, ukuran dan kemakmuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah.

**Kata kunci: Kemandirian daerah, *likuiditas*, *leverage*, ukuran daerah,  
Kemakmuran daerah**

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011 – 2015**

Oleh  
**IMAN FIRMANSYAH**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN AKUNTANSI  
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH  
DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2011 - 2015**

Nama Mahasiswa : **Iman Firmansyah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1511031145**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19620612 199010 2 001

**Basuki Wibowo, S.E., M.S.A., CA, Akt.**  
NIP 19560410 199003 1 001

2. **Ketua Jurusan Akuntansi**

**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19620612 199010 2 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

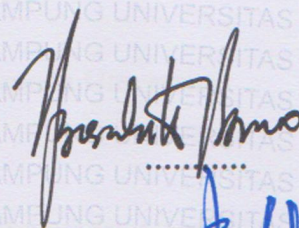
Ketua

: **Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**



Sekretaris

: **Basuki Wibowo, S.E., M.S.A., CA, Akt.**

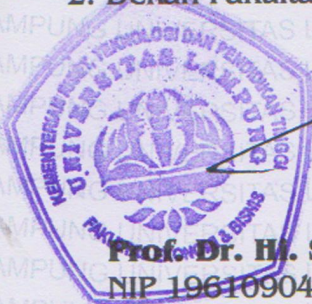


Penguji Utama

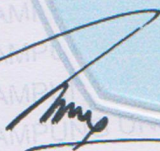
: **Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., CPA., C.A., Akt.**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi**



**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 19610904 198703 1 011



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 September 2017**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Skripsi dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 – 2015” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan saya ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, September 2017

Penulis,



Iman Firmansyah  
NPM 1511031145

## RIWAYAT HIDUP



Iman Firmansyah, lahir di Ciamis pada tanggal 12 Juli 1990 dari pasangan Bapak Kikin Sodikin dan Ibu Sukarsih. Merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Nusawiru, Ciamis dan lulus pada tahun 2002. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Cijulang yang diselesaikan pada tahun 2005, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Ciamis hingga lulus pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan Diploma III Spesialisasi Akuntansi Pemerintahan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis merintis karir sebagai verifikator keuangan di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hingga akhirnya pada tahun 2015 mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan Akuntansi Universitas Lampung melalui program *State Accountability Revitalization Project (STAR)* yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB).



## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat yang diberikan,

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Ibunda, Sukarsih

Ayahanda, Kikin Sodikin

Bidadariku, Novia Ayu Anjarwati, S.Akun.

Anak Sholih, Luqman Ali Abdurrahman

Institusiku, Sekretariat Jenderal

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Almamaterku, Universitas Lampung

## **MOTTO**

Lillah (karena Allah)

Billah (dengan pertolongan Allah)

Fillah (di atas syariat Allah)

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta’atan kepadaNya dalam (menjalankan) agama yang lurus ...”

(QS Al-Bayyinah: 5)

## SANWACANA

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk-Nya lah skripsi berjudul “Analisis Hubungan Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia dengan Indeks Bursa Utama Dunia Tahun 2007-2016” dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi
4. Bapak Basuki Wibowo, S.E., M.S.A., CA, Akt., sebagai Dosen Pembimbing II, terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi.

5. Bapak Drs. Achmad Zubaidi Indra, M.M., CPA., C.A., Akt., selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan guna penyempurnaan skripsi.
6. Ibu Agustina Awan, Bapak Noveriadi, Bapak Sobari, Bapak Sulaiman, Bapak Yogi, Mbak Diana, beserta seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, terima kasih atas segala pelayanan dan bantuan yang diberikan.
7. Ibunda, Sukarsih, Ayahanda, Kikin Sodikin, Adinda Riska Karningsih, Adinda Dicky Septiana, dan Adinda Bella Puspita. Terima kasih atas segala kehangatan, kasih sayang, doa, pengorbanan, kesabaran, serta dukungan kepada penulis.
8. Bidadariku, Novia Ayu Anjarwati dan Anakku yang sholih, Luqman Ali Abdurrahman, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan sehingga penulis dapat selalu bersemangat dalam mewujudkan impian.
9. Ibu mertua Tri Rahayuningsih, S.Pd dan Bapak mertua Drs. Soemarni yang selalu menyayangi, membimbing, dan memberikan dukungan kepada penulis.
10. Sahabat Man Jada Wa Jadda, Winarso Tri Rahayu, Eko Fauzi, Alfian Prihanadi, Ganjar Asdi Sudrajat, dan Erwin Pandu Wardana, terima kasih atas kehangatan, kebersamaan, dan menjadi penyemangat penulis dalam suka dan duka.
11. Seluruh rekan-rekan STAR BPKP Batch 2 Universitas Lampung, terima kasih atas kebersamaan yang diberikan selama ini.
12. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan dan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih ditemukan banyak kekurangan, karenanya penulis terbuka terhadap berbagai saran dan masukan guna perbaikan di masa depan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung,      September 2017

Penulis,

Iman Firmansyah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG .....	i
ABSTRACT .....	ii
ABSTRAK .....	iii
HALAMAN JUDUL.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO .....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS .....	8
2.1 Kajian Pustaka.....	8
2.1.1 Teori Keagenan .....	8
2.1.2 Teori Stakeholder .....	9
2.1.3 Likuiditas.....	10
2.1.4 <i>Leverage</i> .....	12
2.1.5 Jumlah Aset sebagai Ukuran Organisasi .....	13
2.1.6 Kemakmuran Daerah.....	14
2.1.7 Kemandirian Daerah.....	15

2.1.8	Riset Terdahulu .....	18
2.2	Hipotesis .....	21
III.	METODE PENELITIAN .....	25
3.1	Jenis Penelitian .....	25
3.2	Definisi dan Operasional Variabel .....	25
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian .....	27
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.5	Rerangka Pemikiran .....	28
3.6	Metode Analisis Data .....	28
3.6.1	Statistik Deskriptif .....	28
3.6.2	Pemilihan Model Regresi .....	29
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN .....	36
4.1	Populasi dan Sampel Penelitian .....	36
4.2	Analisa Statistik Deskriptif .....	38
4.2.1	Variabel Dependen .....	39
4.2.2	Variabel Independen .....	40
4.3	Pemilihan Model Regresi .....	42
4.3.1	Uji Chow ( <i>Chow Test</i> ) .....	42
4.3.2	Uji Hausman ( <i>Hausman Test</i> ) .....	43
4.3.3	Uji Lagrange Multiplier ( <i>LM Test</i> ) .....	43
4.4	Uji Asumsi Klasik .....	44
4.4.1	Uji Normalitas .....	44
4.4.2	Uji Multikolinieritas .....	45
4.4.3	Uji Autokorelasi .....	46
4.4.4	Uji Heteroskedasitas .....	46
4.4.5	Analisis Regresi Berganda .....	47
4.5	Pengujian Hipotesis .....	49
4.5.1	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	49
4.5.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) .....	49
4.5.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T) .....	50

V.	KESIMPULAN DAN SARAN .....	54
5.1	Kesimpulan.....	54
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	55
5.3	Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Proporsi PAD dan DAU Terhadap Total Pendapatan TA 2015 .....	4
Tabel 2. 1 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah .....	18
Tabel 2. 2 <i>Research Gap</i> atas Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	26
Tabel 3. 2 Variabel dan Sumber Data .....	27
Tabel 4. 1 Proses Pengambilan Sampel .....	37
Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Statistika Deskriptif .....	38
Tabel 4. 3 Statistik Hasil Evaluasi Kemandirian Keuangan Daerah.....	39
Tabel 4. 4 Uji Chow .....	42
Tabel 4. 5 Uji Hausman .....	43
Tabel 4. 6 Uji Lagrange Multiplier .....	43
Tabel 4. 7 Uji Normalitas Data .....	44
Tabel 4. 8 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	45
Tabel 4. 9 Hasil Uji Autokorelasi .....	46
Tabel 4. 10 Hasil Regresi Berganda dengan Model <i>Random Effect</i> .....	47

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data Variabel Penelitian

Lampiran 2 Opini BPK atas LKPD Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2011-2015

Lampiran 3 Tabel PDRB Perkapita Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2011-2015

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Reformasi keuangan daerah telah melahirkan berbagai kebijakan yang mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu kebijakan yang menyertai reformasi keuangan daerah adalah lahirnya otonomi daerah yang ditandai dengan munculnya Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun misi utama UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan (Bisma, 2010).

Menurut Mardiasmo (2011: 59), tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah. Penyelenggaraan pemerintah melalui otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Kusnandar, 2012). Keberhasilan menjalankan otonomi daerah dapat diukur dari kinerja keuangan daerah (Sularso, 2011: 14). Menurut Gomes dan Osborne (2010), kinerja keuangan dipengaruhi oleh lingkungan teknis dan institusional sehingga peran pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan otonomi daerah ini.

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Puspitasari, 2013). Pemerintah daerah memiliki keleluasaan pengambilan keputusan serta mempunyai kewenangan luas dalam upaya mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki guna menyejahterakan masyarakat (Mercy, 2013).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah (Mahmudi, 2010: 136-149). Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya (Hadi, 2010).

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Menurut Halim (2013), kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Transfer dari pemerintah pusat di Indonesia dikenal sebagai dana perimbangan (Suhardjanto et

al., 2010). Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2010: 142). Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (Riwu Kaho, 2012).

Namun, realita menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pemerintah daerah di Indonesia berhasil mencapai tingkat kemandirian keuangan yang diharapkan. Masih banyak pemerintah kabupaten/kota di daerah yang sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Salah satu pemerintah daerah yang masih menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam porsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya adalah pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung.

Dikutip dari media online inilampung.com tanggal 14 Juli 2016, dalam Rapat Paripurna Panja LHP BPK RI DPRD Lampung tanggal 13 Juli 2016, sekretaris Panja LHP, Edi Rusdianto menyatakan bahwa rasio PAD dari total pendapatan masih menunjukkan tidak adanya kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, dana perimbangan juga masih besar dibandingkan pendapatan asli daerah. Pernyataan tersebut sesuai dengan data hasil audit laporan keuangan BPK RI Tahun 2015 menunjukkan bahwa rata-rata porsi PAD terhadap total pendapatan kabupaten/kota di wilayah provinsi Lampung hanya mencapai 6,89%. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan porsi dana alokasi umum terhadap total pendapatan rata-ratanya hampir 60%.

Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan pencapaian PAD yang masih rendah dan proporsi DAU justru cenderung lebih tinggi dari proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2015.

Tabel 1. 1 Proporsi PAD dan DAU Terhadap Total Pendapatan TA 2015

No.	Kabupaten/Kota	Proporsi PAD	Proporsi DAU
1	Kabupaten Lampung Selatan	10,44%	56,98%
2	Kabupaten Lampung Tengah	5,71%	59,94%
3	Kabupaten Lampung Utara	6,66%	61,48%
4	Kabupaten Lampung Barat	5,19%	54,84%
5	Kabupaten Tulang Bawang	3,46%	55,68%
6	Kabupaten Tanggamus	1,78%	56,73%
7	Kabupaten Lampung Timur	5,05%	58,26%
8	Kabupaten Way Kanan	4,56%	60,90%
9	Kabupaten Pesawaran	3,89%	63,43%
10	Kabupaten Pringsewu	5,95%	54,94%
11	Kabupaten Mesuji	3,03%	65,13%
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	2,04%	55,02%
13	Kota Bandar Lampung	21,56%	51,54%
14	Kota Metro	17,21%	57,04%
<b>Rata-rata</b>		<b>6,89%</b>	<b>57,99%</b>

Sumber: Olah data penulis

Hal ini mencerminkan masih besarnya ketergantungan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Lampung terhadap anggaran dana perimbangan dari pusat. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2011 – 2015. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kemandirian keuangan daerah dengan perbedaan variabel, objek, dan tahun penelitian.

Patrick (2007) telah meneliti mengenai karakteristik daerah yang diterapkan pada pemerintah daerah Pennsylvania. Variabel yang digunakan untuk memproksikan karakteristik daerah terdiri dari ukuran daerah, *functional differentiation*, umur daerah dan, *intergovernmental revenue*. Penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) menggunakan ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja daerah dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Imawan (2014) menunjukkan bahwa kemakmuran berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) yang menyatakan bahwa kemakmuran tidak berpengaruh secara statistik terhadap kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2010) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Imawan (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara statistik terhadap kemandirian keuangan daerah. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandhya (2013) yang menyatakan bahwa ukuran tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Mengingat hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beda-beda, maka penelitian ini ditujukan untuk meneliti sekali lagi variabel ukuran, kemakmuran, dan tingkat utang terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam

penelitian ini, tingkat utang akan diukur dengan menggunakan rasio leverage dan likuiditas untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 – 2015”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. apakah likuiditas berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di wilayah provinsi Lampung?
2. apakah *leverage* berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di wilayah provinsi Lampung?
3. apakah ukuran berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di wilayah provinsi Lampung?
4. apakah kemakmuran berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di wilayah provinsi Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di wilayah provinsi Lampung;



2. untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di wilayah provinsi Lampung;
3. untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di wilayah provinsi Lampung;
4. untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kemakmuran terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di wilayah provinsi Lampung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat seoptimal mungkin baik dari sisi praktis maupun teoritis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. dari sisi praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi entitas pemerintahan untuk memperhatikan faktor-faktor pendorong kemandirian keuangan daerah; dan
2. dari sisi teoretis diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan sebagai bahan masukan maupun referensi kepustakaan bagi penelitian - penelitian selanjutnya yang tertarik dengan pokok bahasan keuangan pemerintahan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori Agensifikasi atau *Agency Theory* merupakan sebuah teori yang menunjukkan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Dalam teori keagenan, pemilik memilih untuk melakukan kontrak dengan agen karena alasan biaya dan keahlian (Slyke, 2006). Dalam teori ini terdapat hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen (Anthony dan Govindarajan, 2005). Prinsipal meminta agen untuk melakukan suatu kegiatan atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Penerapan teori keagenan dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi dan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik (*oportunistic behaviour*). Akan tetapi, penerapan teori keagenan lebih banyak yang menimbulkan hal negatif karena pihak agensi memiliki informasi keuangan yang lebih daripada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan pihak principal dapat memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya sendiri (*self-interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*). Masalah keagenan ini dapat terjadi pada semua organisasi, baik organisasi publik maupun privat (Asmara, 2010).

Hubungan keagenan di sektor publik terjadi antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim, 2002). Dalam hubungan tersebut, legislatif mendelegasikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan kepada pihak eksekutif. Seperti dikemukakan

sebelumnya, di antara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang sering timbul di antara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan.

Hubungan keagenan juga terjadi antara masyarakat dan legislatif. Legislatif menjadi agen bagi masyarakat untuk mewakili kepentingan mereka di Parlemen. Masyarakat sebagai *The Ultimate Principal* (Abdullah dan Asmara, 2006) mengharapkan legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang dapat membawa kemakmuran bagi mereka.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, masyarakat sebagai prinsipal menaruh kepercayaan penuh kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masyarakat memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar tercipta kemandirian keuangan daerah.

### **2.1.2 Teori Stakeholder**

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan memaksimalkan laba untuk kepentingan para pemegang saham, namun lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan sebetulnya tidak

terbatas kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan *stakeholder*, yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan terhadap perusahaan.

Keberhasilan sebuah organisasi publik maupun swasta ialah sejauh mana organisasi tersebut dapat menjamin kepuasan para *stakeholder* utama (masyarakat). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam roda pemerintahan harus menekankan aspek kepentingan rakyat selaku *stakeholder* dan pemerintah juga harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, serta aset daerah untuk kesejahteraan rakyat guna terciptanya kemandirian daerah (Susanto, 2015).

### **2.1.3 Likuiditas**

Likuiditas merupakan salah satu alat analisis rasio laporan keuangan. Analisis rasio merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu perkiraan dengan perkiraan yang lain dalam laporan keuangan yang sama dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kelemahan dan kemampuan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Analisis rasio dapat digunakan untuk menilai pencapaian manajemen dimasa lalu dan memprediksi prospek kinerja manajemen dimasa yang akan datang.

Menurut Munawir (2007: 31), likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera harus dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Pendapat lain menyatakan bahwa likuiditas adalah kemampuan aktiva untuk diubah kedalam bentuk tunai tanpa adanya konsesi harga yang signifikan (Horne, 2005: 206).

Perusahaan dikatakan *likuid* apabila memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dinilai sebagai perusahaan yang *illikuid*. Pada saat jatuh tempo, perusahaan harus membayar kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman. Untuk dapat memenuhi kewajibannya, perusahaan harus memiliki jumlah kas atau aktiva lancar lainnya yang dapat segera dikonversi atau diubah menjadi kas untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam sektor publik khususnya pemerintah daerah, perhitungan rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membayar utang (kewajiban) jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri atas:

1. *Current Ratio*

*Current Ratio* adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek. Aktiva lancar meliputi kas, piutang dagang, persediaan, efek, dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan utang jangka pendek pada pemerintah daerah meliputi utang perhitungan pihak ketiga, utang beban bunga, utang beban pegawai, pendapatan diterima dimuka, utang beban barang dan jasa, serta utang jangka pendek lainnya.

Pos persediaan pada neraca pemerintah daerah umumnya bukan merupakan persediaan barang dagangan yang ditujukan untuk dijual, akan tetapi untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau diserahkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam perhitungan rasio lancar sebaiknya tidak memperhitungkan pos persediaan (Hadi, 2010).

2. *Cash Ratio*

Menurut Sutrisno (2009:216), *cash ratio* merupakan rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas adalah efek atau surat berharga.

Perhitungan rasio likuiditas pada instansi pemerintah daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada penelitian ini, rasio likuiditas akan diukur dengan menggunakan rasio kas yaitu dengan cara membandingkan aktiva lancar (kas dan setara kas) dengan utang jangka pendek. Semakin tinggi tingkat likuiditas berarti semakin kecil utang pemerintah daerah sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian daerah karena tidak terbebannya pemerintah daerah dengan sumber dana dari pinjaman atau utang.

#### **2.1.4 Leverage**

*Leverage* merupakan proporsi total hutang yang dimiliki suatu perusahaan terhadap rata-rata ekuitas. *Leverage* menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat terlihat seberapa besar resiko tidak tertagihnya utang. Pendapat lain tentang pengertian *leverage* menurut Ridwan dan Barlian (2005:151) mengatakan bahwa *leverage* adalah merupakan hasil dari pada penggunaan dana dengan biaya tetap untuk meningkatkan pengembalian kepada pemegang saham.

Tujuan *leverage* bagi perusahaan adalah meningkatkan hasil pengambilan bagi para pemegang saham biasa, walaupun hal ini berdampak pada peningkatan resiko yang ditanggung baik resiko bisnis maupun resiko keuangan. Perubahan *leverage* menghasilkan perubahan pada tingkat pengembalian resiko,

apabila *leverage* mengalami peningkatan maka tingkat pengembalian dan resiko juga mengalami peningkatan.

Dalam lingkup sektor publik khususnya pemerintah daerah, *leverage* merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah), semakin besar hutang yang dimiliki suatu entitas maka semakin rendah kemandirian keuangan entitas tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki *leverage* tinggi maka memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utamanya berasal dari pihak eksternal

Menurut Hadi (2010), rasio *leverage* menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Kemandirian keuangan daerah tidak terlepas dari ada atau tidaknya posisi kewajiban entitas dalam hal membiayai pengeluaran untuk pembangunan daerah. Semakin mampu menutup hutang dengan ekuitas dana yang dimiliki berarti semakin kecil unsur hutang sehingga semakin menaikkan tingkat kemandirian daerah dengan tidak terbebannya daerah dengan sumber dana eksternal berupa pinjaman atau hutang.

#### **2.1.5 Jumlah Aset sebagai Ukuran Organisasi**

Ukuran organisasi adalah pembahasan mengenai besar kecilnya suatu organisasi dilihat dari ukuran-ukuran tertentu serta apa dan bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan organisasi tersebut. Ukuran organisasi adalah prediktor signifikan untuk kepatuhan akuntansi (Suhardjanto, 2011). Ukuran perusahaan/organisasi dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain jumlah karyawan, total aset, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Suhardjanto et al, 2010). Demikian pula menurut Wahyuningsih dan Tanggulangan (2014), ukuran

organisasi mengacu pada total aset atau total pendapatan organisasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan total aset untuk mengukur ukuran. Pertimbangan pengukuran ini karena nilai aset biasanya lebih stabil daripada nilai penjualan bersih dan kapitalisasi pasar dalam mengukur ukuran perusahaan (Kusumawardani, 2012)

Dalam konteks sektor publik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat menggunakan jumlah aset sebagai proksi dari ukuran organisasi. Aset menggambarkan kekayaan daerah baik yang berupa infrastruktur maupun sarana dan prasarana daerah. Besarnya jumlah aset dapat membantu operasional kegiatan pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut (Mustikarini dan Fitasari, 2012). Sejalan dengan itu, dalam penelitiannya Masdiantini dan Erawati (2016) menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total pendapatan daerah berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah yang salah satunya diproksikan dengan kemandirian daerah. Demikian pula penelitian Imawan (2014), menyatakan bahwa semakin besar total aset yang dimiliki menunjukkan pemerintah daerah akan semakin mudah dalam mendapatkan pendapatan asli daerah yang merupakan indikator kemandirian keuangan daerah.

#### **2.1.6 Kemakmuran Daerah**

Kemakmuran adalah kemampuan daerah dalam mencukupi kebutuhan guna menuju kesejahteraan (Susanto, 2015). Kemakmuran suatu negara dapat



diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda.

Todaro (2000) menyatakan bahwa pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan yang diterima masyarakat maka semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Menurut Imawan (2014), kemakmuran sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang berjalannya di daerah tersebut. Semakin tinggi kemakmuran suatu daerah, maka semakin besar pendapatan daerah sehingga akan memberikan peluang terhadap meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

#### **2.1.7 Kemandirian Daerah**

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Rukmana, 2013).

Kemandirian daerah khususnya di bidang keuangan merupakan cita-cita seluruh pemerintah daerah otonom. Nataluddin (2001) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada:

1. kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya;
2. ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu pendapatan asli daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Pengukuran kemandirian keuangan pemerintah daerah sangat bergantung pada jumlah pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri. Jika PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah pusat bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Sebaliknya jika PAD suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman daerah serta bantuan pemerintah pusat seperti DAU, DAK dan DBH maka daerah tersebut dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Wandira, 2013).

Rasio Kemandirian digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mendanai segala aktivitasnya. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) terhadap jumlah dana alokasi umum (DAU) ditambah jumlah pinjaman. Dana alokasi umum

merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditransfer ke pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan yang jumlahnya lebih besar sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari DAU dan DAK (Julitawati, 2012).

Bila perbandingan sumber pembiayaan dari PAD terhadap DAU semakin besar, berarti hal ini menunjukkan tingkat kemandirian yang semakin meningkat pula. Bila pinjaman jumlahnya dianggap material, maka untuk mengukur kemandirian unsur pinjaman tersebut harus diperhitungkan, akan tetapi sebaiknya mengeluarkan Utang PFK dan Utang Pajak Pusat sebab kedua jenis utang tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah sumber pendanaan pemerintah daerah. Rasio kemandirian menurut Hadi (2010) diformulasikan sebagai berikut:

Rasio Kemandirian:

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\{\text{DAU} + (\text{Utang} - \text{Utang PFK} - \text{Utang Pajak Pusat})\}} \times 100\%$$

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (Halim, 2001:168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut.

- a. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

- c. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2. 1 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

<b>Rasio Kemandirian (%)</b>	<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Pola Hubungan</b>
0 – 25	Rendah Sekali	Instruktif
>25 – 50	Rendah	Konsultatif
>50 – 75	Sedang	Partisipatif
>75 – 100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2011)

### 2.1.8 Riset Terdahulu

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian latar belakang penelitian bahwa penelitian ini merupakan kelanjutan penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa riset terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain dilakukan oleh Hadi (2010), Kusumawardani (2012), Imawan (2014), dan Susanto (2015).

Penelitian dengan metode studi korelasional oleh Hadi (2010) tentang pengaruh variabel likuiditas dan *leverage* terhadap kemandirian keuangan daerah menunjukkan hasil sebagai berikut:

- 1) Likuiditas dengan rasio lancar dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian daerah pada pemerintah daerah dalam wilayah Provinsi Aceh sebesar 52,0%.
- 2) Likuiditas dengan rasio lancar secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah pada pemerintah daerah dalam wilayah Provinsi Aceh sebesar 74,3%.
- 3) Leverage secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah pada pemerintah daerah dalam wilayah Provinsi Aceh hanya sebesar 2,2%.

Riset analisa deskriptif yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) yang meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan indikator rasio kemandirian keuangan menjelaskan bahwa ukuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena posisi *leverage* suatu instansi non pemerintah berbeda dengan posisi *leverage* pada pemerintah daerah.

Adapun penelitian kuantitatif oleh Imawan (2014) menunjukkan hasil bahwa ukuran berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah karena semakin besar total aset yang dimiliki, semakin meningkatkan jalannya perekonomian sehingga semakin mudah mendapatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan variabel *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah karena pembiayaan pemerintah daerah tidak hanya

melalui hutang melainkan juga berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat yang cukup besar.

Sementara itu, Susanto (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Karakteristik Pemerintah Daerah Pendorong Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Tengah menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan *leverage* terhadap kemandirian keuangan daerah. Karena, sesuai dengan *trade-off theory*, semakin besar *leverage* daerah maka pemerintah daerah akan selalu berusaha menyesuaikan tingkat *leverage* ke arah yang optimal, sehingga tingkat *leverage* pemerintah daerah bergerak terus dari waktu ke waktu untuk arah suatu target yang ingin dicapai yaitu kemandirian keuangan daerah.

Ikhtisar terkait *research gap* antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2 Research Gap atas Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil	Teknik Analisis Data	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Waskito Hadi Jurnal Akuntansi	2010	Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 di Wilayah Provinsi Aceh)	Likuiditas dan <i>leverage</i> secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah	Studi Korelasional	Objek, Tahun, Teknik Analisis Data
2.	Media Kusumawardani Jurnal Akuntansi	2012	Pengaruh <i>Size</i> , Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja	Ukuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan <i>leverage</i> dan	Analisa Deskriptif	Objek, Variabel, Teknik Analisis Data

			Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia	di	kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.		
3.	Riswanda Imawan dan Agus Wahyudin  Jurnal Akuntansi	2014	Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010- 2012		Ukuran dan kemakmuran berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian daerah	Regresi Berganda	Objek, Tahun Variabel,
4.	Eliza Dewi Susanto dan Henny Murtini  Jurnal Akuntansi	2015	Karakteristik Pemerintah Daerah Pendorong Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Tengah		<i>Leverage</i> dan kemakmuran berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah	Statistika Deskriptif	Objek, Variabel, Teknik Analisis Data
5.	Gita Maiyora  Jurnal Ekonomi	2015	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Ukuran berpengaruh signifikan terhadap kinerja. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja	Regresi Berganda	Objek, Tahun, Variabel

Sumber: Data diolah

## 2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang penelitian serta pertimbangan logis dari yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pengaruh likuiditas terhadap kemandirian keuangan daerah

Perhitungan rasio likuiditas pada instansi pemerintah daerah digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada penelitian ini, rasio likuiditas akan diukur dengan

menggunakan rasio kas yaitu dengan cara membandingkan aktiva lancar (kas dan setara kas) dengan utang jangka pendek.

Pengukuran kemandirian daerah menggunakan indikator rasio kemandirian. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal yang dimaksud selain dana perimbangan dari pusat, juga unsur pinjaman yang harus turut diperhitungkan selain Utang PFK dan Utang Pajak Pusat sebab kedua jenis utang tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah sumber pendanaan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Hadi (2010) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas berarti semakin kecil utang pemerintah daerah sehingga semakin tinggi tingkat kemandirian daerah karena tidak terbebannya pemerintah daerah dengan sumber dana dari pinjaman atau utang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka pendapat penulis terkait pengaruh likuiditas terhadap kemandirian keuangan daerah, apabila dihipotesiskan akan menjadi:

*H1: Likuiditas berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah*

b. Pengaruh *leverage* terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah

*Leverage* merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Rasio *leverage* pada suatu pemerintah daerah digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah), semakin besar *leverage* maka semakin besar utang yang dimiliki suatu entitas maka semakin rendah kemandirian keuangan entitas tersebut.



Menurut Imawan (2014) melalui penelitiannya pada sektor publik, menyatakan semakin besar rasio *leverage* maka semakin menunjukkan sebuah entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil rasio *leverage* maka semakin besar kemampuan sebuah entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya. Pendapat tersebut mengandung artian bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki oleh suatu entitas maka semakin buruk tingkat kemandirian keuangannya, pun sebaliknya.

Berangkat dari uraian tersebut maka hubungan antara leverage terhadap kemandirian keuangan daerah, apabila dihipotesiskan menjadi:

*H2: Leverage berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah*

c. Pengaruh ukuran terhadap kemandirian keuangan daerah

Ukuran, dalam konteks sektor publik baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menggambarkan jumlah aset atau kekayaan daerah yang berupa infrastruktur, sarana dan prasarana. Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan dibidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) guna kemajuan daerah.

Penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) menghasilkan kesimpulan bahwa semakin besar ukuran daerah yang dinilai dari semakin besarnya total aset pemerintah daerah, diharapkan akan semakin mudah pula dalam mendapatkan

pendapatan asli daerah yang merupakan indikator kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan alasan itulah maka hubungan antara ukuran dan kemandirian keuangan pemerintah daerah, apabila dihipotesiskan menjadi:

*H3: Ukuran berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah*

d. Pengaruh kemakmuran terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah

Kemakmuran adalah kemampuan daerah dalam mencukupi kebutuhan guna menuju kesejahteraan. Abdullah (2004) menyatakan bahwa PAD merupakan salah satu ukuran kemakmuran suatu daerah. Semakin besar PAD yang diterima suatu daerah maka semakin tinggi tingkat kemakmuran daerah tersebut sehingga akan memberikan peluang terhadap meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Imawan (2014) menunjukkan bahwa kemakmuran berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan uraian tersebut maka hubungan kemakmuran dan kemandirian keuangan daerah, apabila dihipotesiskan menjadi:

*H4: Kemakmuran berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah*

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian kausal. Dalam buku Panduan Penulisan Usul dan Laporan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2016, penelitian kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel (variabel independen) terhadap variabel lainnya (variabel dependen). Satu variabel terikat adakalanya dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas sehingga diperlukan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh tersebut (Suyana, 2012). Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif yang menguji keterkaitan antara 3 (tiga) variabel independen terhadap 1 (satu) variabel dependen. Sugiyono (2014:14) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah di wilayah provinsi Lampung tahun anggaran 2011 – 2015.

### **3.2 Definisi dan Operasional Variabel**

Sekaran (2010) memaparkan bahwa perlu dilakukan tahapan operasionalisasi konsep atau dengan kata lain mendefinisikan secara operasional sebuah konsep agar dapat membuatnya bisa diukur, yang dilakukan dengan cara

melihat pada dimensi perilaku, aspek, atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep. Pengukuran sendiri menurut Hartono (2014) merupakan aktivitas pemberian nilai properti dari sebuah objek.

Berikut adalah definisi konseptual dan operasional dari masing – masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1	2	3	4	5
1	Kemandirian Daerah (MNDR)	Kemandirian daerah adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya.	Logaritma dari rasio kemandirian. Rasio Kemandirian: $= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\{\text{DAU} + (\text{Utang} - \text{Utang PFK} - \text{Utang Pajak Pusat})\}}$	Rasio
2	Likuiditas (LIK)	Likuiditas merupakan kemampuan entitas untuk membayar utang (kewajiban) jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya.	Logaritma dari rasio kas. Rasio Kas: $= \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Hutang Jangka Pendek}}$	Rasio
3	<i>Leverage</i> (LEV)	<i>Leverage</i> merupakan kemampuan entitas dalam mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang	Logaritma dari rasio <i>leverage</i> . Rasio <i>Leverage</i> : $= \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas Dana}}$	Rasio
4	Ukuran (UK)	Ukuran merupakan total aset yang dimiliki pemerintah daerah yang menggambarkan besar kecilnya organisasi pemerintah tersebut	Ukuran = Logaritma dari Total Aset	Nominal
5	Kemakmuran (MAK)	Kemakmuran adalah kemampuan daerah dalam mencukupi kebutuhan guna menuju kesejahteraan.	Kemakmuran = Logaritma dari PDRB Perkapita	Rasio

Sumber: Data diolah

### 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011 – 2015 di wilayah provinsi Lampung. Teknik pengambilan sampel menggunakan sistem *purposive sampling* dengan kriteria LKPD yang memiliki data lengkap untuk pengukuran seluruh variabel dan telah diaudit oleh BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). LKPD yang mendapat opini *adverse* dan *disclaimer* dari BPK tidak akan dimasukkan dalam sampel penelitian ini karena keakuratan data tidak bisa dipertanggungjawabkan.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara teknik dokumentasi yakni metode pengumpulan data dengan cara mendokumentasikan arsip dan dokumen yang terkait dengan materi penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain (Sekaran, 2010). Sumber atas data sekunder yang diperoleh untuk masing-masing variabel dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Variabel dan Sumber Data

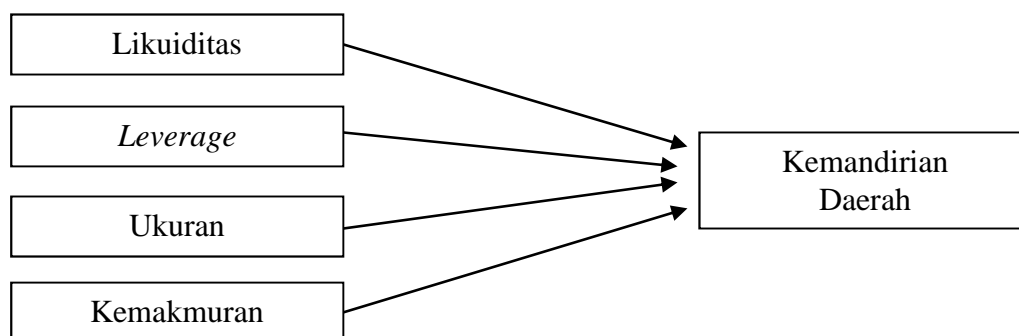
Variabel Penelitian	Sumber Data
Kemandirian Daerah	LKPD <i>audited</i>
Likuiditas	LKPD <i>audited</i>
<i>Leverage</i>	LKPD <i>audited</i>
Ukuran Daerah	LKPD <i>audited</i>
Kemakmuran	<a href="https://lampung.bps.go.id/">https://lampung.bps.go.id/</a>

Sumber: Data diolah

### 3.5 Rerangka Pemikiran

Menurut Riduwan (2010: 26), kerangka berfikir dapat disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti serta keterkatam antar variabel yang diteliti. Berdasarkan kerangka teoritis yang dikembangkan menjadi suatu kerangka pemikiran dalam penelitian tentang pengaruh likuiditas, *leverage*, ukuran, dan kemakmuran terhadap kemandirian daerah ini, maka dapat digambarkan dalam diagram skematis kerangka pemikiran sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2.1 Model Kerangka Pikir Penelitian



### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan model regresi linier berganda, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji signifikansi simultan (uji statistik  $f$ ), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik  $t$ ). Untuk memenuhi asumsi klasik, semua variabel akan ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma.

#### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Sugiyono (2014) adalah statistik yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan

kemudian membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskriptif mengenai data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemiringan distribusi).

### 3.6.2 Pemilihan Model Regresi

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan regresi data panel (*panel pooled data*) untuk menganalisis pengaruh likuiditas, *leverage*, ukuran daerah, dan kemakmuran terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Pengujian akan dilakukan dengan bantuan software Eviews 9.

Dalam mengestimasi model regresi data panel dapat digunakan tiga teknik uji regresi yaitu *Ordinary Least Square (OLS)/common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* (Nachrowi dan Usman, 2006:317). Dari ketiga teknik estimasi tersebut akan dipilih salah satu teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel. Pemilihan tersebut didasarkan atas uji-uji sebagai berikut.

#### 3.6.2.1 Chow Test

*Chow test* digunakan untuk memilih antara model *Ordinary Least Square (OLS)/common effect* dengan model *fixed effect* yang paling tepat digunakan untuk estimasi data panel. Dengan kriteria hipotesis sebagai berikut:

H<sub>0</sub> = Pilih model *Ordinary Least Square (OLS)/common effect*

H<sub>1</sub> = Pilih model *Fixed effect*

Jika nilai *probability Cross-section Chi-square* lebih kecil dari 0,05 maka H<sub>1</sub> diterima artinya model yang dipilih adalah model *fixed effect*. Tetapi jika nilai *probability Cross-section Chi-square* lebih besar dari 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima

artinya model yang dipilih adalah model *Ordinary Least Square (OLS)/common effect*.

### 3.6.2.2 Hausman Test

*Hausman test* digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* dengan model *random effect* yang paling tepat digunakan untuk estimasi data panel. Dengan kriteria hipotesis sebagai berikut:

H0 = Pilih model *Random effect*

H1 = Pilih model *Fixed effect*

Jika nilai *probability Cross-section random* lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima artinya model yang dipilih adalah model *fixed effect*. Tetapi jika nilai *probability Cross-section random* lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima artinya model yang dipilih adalah model *random effect*.

### 3.6.2.3 Lagrange Multiplier Test

*Lagrange Multiplier (LM) test* digunakan untuk menentukan apakah model *random effect* lebih baik daripada model *Ordinary Least Square (OLS)/common effect* untuk mengestimasi data panel. Dengan kriteria hipotesis sebagai berikut:

H0 = Pilih model *Ordinary Least Square (OLS)/common effect*

H1 = Pilih model *Random effect*

Jika nilai *probability Cross-section Breusch-Pagan* lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima artinya model yang dipilih adalah model *random effect*. Tetapi jika nilai *probability Cross-section Breusch-Pagan* lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima



artinya model yang dipilih adalah model *Ordinary Least Square (OLS)/common effect*.

### **3.6.3 Uji Asumsi Klasik**

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Pada pengujian penelitian ini, pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut.

#### **3.6.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas data digunakan untuk melakukan pengujian data observasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Data yang dapat digunakan untuk pengujian model regresi adalah data yang terdistribusi normal. Dalam penelitian ini untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak akan menggunakan alat uji yang berupa uji *Jarque-Bera*. Kriteria yang digunakan adalah membandingkan probability value *Jarque-Bera* yang diperoleh dengan pedoman pengambilan keputusan dimana jika *probability value* lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal dan sebaliknya jika *probability value* lebih kecil dari 0,05 maka data terdistribusi tidak normal.

#### **3.6.3.2 Uji Multikolinearitas**

Pengujian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan linier antar variabel independen. Salah satu cara untuk melihat ada tidaknya adalah dengan membuat matrik korelasi antar variabel, jika nilai korelasi antar variabel berada pada nilai diatas 0,8 maka ada multikolinieritas. Sebaliknya jika berada dibawa

0,8 maka tidak ada multikolinearitas. Untuk melakukan pengujian ini bisa digunakan perangkat lunak Eviews 9, setelah itu akan didapatkan nilai korelasi antar variabel model. Selanjutnya dianalisis hubungan antar variabel independen, apakah terjadi multikolinearitas atau tidak.

### **3.6.3.2 Uji Autokorelasi**

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Problem autokorelasi akan muncul jika terjadi korelasi didalamnya. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering muncul pada data runtut waktu karena gangguan populasi cenderung mempengaruhi populasi yang sama pada periode berikutnya.

### **3.6.3.4 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model regresi linier bersifat BLUE maka  $var(ui)$  harus sama dengan  $\sigma^2$  (konstan), atau dengan kata lain semua residual atau *error* mempunyai varian yang sama atau disebut dengan homoskedastisitas. Sedangkan bila varian tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan heteroskedastisitas (Nachrowi dan Usman, 2006).

### 3.6.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh likuiditas, leverage, ukuran daerah, dan kemakmuran terhadap kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitian ini, penulis akan menguji hipotesis menggunakan alat uji analisis regresi berganda, penghitungan koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik t.

#### 3.6.2.1 Model Regresi Linear Berganda

Menurut Riduwan (2010: 154), analisis regresi berganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidak adanya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara simultan. Persamaan regresinya dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$MAN = + \text{ }_1\text{LIK} + \text{ }_2\text{LEV} + \text{ }_3\text{UK} + \text{ }_4\text{MAK} + e$$

Keterangan:

MAN = Kemandirian Keuangan Daerah

= Konstanta

$\text{ }_1, \text{ }_2, \text{ }_3, \text{ }_4$  = Koefisien Regresi Variabel Independen

e = Koefisien *Error*

LIK = Likuiditas

LEV = *Leverage*

UK = Ukuran Daerah

MAK = Kemakmuran

### 3.6.2.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini digunakan untuk menerangkan sampai sejauh mana variasi variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independennya.  $R^2$  memiliki nilai interval antara 0 dan 1. Apabila nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sama dengan 0 berarti variabel dependen tidak dapat diterangkan oleh variabel independen sama sekali. Sementara jika nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sama dengan 1 berarti variabel dependen secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel independen. Jadi semakin tinggi nilai  $R^2$  maka suatu regresi tersebut akan semakin baik.

### 3.6.2.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan dari model regresi linear berganda yang diajukan dapat diterima atau tidak. Kriteria yang digunakan adalah *probability value (sig)*, apabila *probability value* dalam hasil pengujian lebih kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model yang digunakan sudah tepat dan dapat diterima. Sebaliknya jika *probability value* lebih besar dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa model yang digunakan ditolak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis ini.

### 3.6.2.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui masing-masing pengaruh variabel independen apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan menggunakan

significance level sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi (p value)  $> 0,05$  maka secara individu variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikansi (p value)  $< 0,05$  maka secara individu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kemandirian keuangan daerah di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011-2015, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tingkat likuiditas yang diukur dengan rasio kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Lampung. Besarnya kas yang dimiliki pemerintah daerah untuk menutupi kewajiban lancarnya menunjukkan bahwa daerah tersebut dapat dikatakan mandiri secara keuangan.
2. Tingkat *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Lampung. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung mampu menggunakan sumber-sumber pinjaman dari luar untuk mengelola urusan pemerintah daerahnya secara efektif, sehingga meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
3. Ukuran daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Lampung. Pemerintah daerah dengan total aset yang besar akan mampu menjalankan kegiatan operasional pemerintahan dengan baik dan dapat lebih leluasa memanfaatkan nilai aset yang besar tersebut untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.
4. Kemakmuran daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Lampung. Tingkat PDRB perkapita sebagai

proksi dari kemakmuran mampu menunjukkan kemandirian daerah. Semakin tinggi pendapatan yang diterima maka semakin tinggi kemandirian di daerah tersebut.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam penelitian selanjutnya. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung sehingga daya generalisirnya hanya satu provinsi saja.
2. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa model penelitian hanya mampu menjelaskan pengaruh likuiditas, leverage, ukuran daerah, dan kemakmuran terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Lampung sebesar 32,96%, sedangkan sisanya sebesar 67,04% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung agar senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sehingga dapat lebih mandiri dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahannya.

2. Disarankan bagi penelitian selanjutnya agar meneliti atau mencari dan menambah variabel-variabel lain yang dapat menjelaskan atau mempengaruhi kemandirian daerah tersebut guna menambah variasi penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukry dan Asmara, John Andra. 2006. "Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah; Bukti Empiris atas Aplikasi *Agency Theory* di Sektor Publik". *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang 23-26 Agustus 2006.
- Abdullah, Syukriy. 2004. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan *Principal-Agent Theory*. Makalah disajikan pada *Seminar Antarbangsa* di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antar Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. *Procedding Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang
- Anthony, Robert N. dan Govindarajan, Vijay. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Sebelas. Jakarta: Salemba Empat.
- Asmara, J. A. 2010. "Analisis Perubahan Alokasi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darusalam". *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Vol. 3, No. 2.
- Bisma, I Dewa Gde. dan Susanto, H. 2010. "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007". *Jurnal GaneC Swara*. Edisi Khusus, 4 (3): 75-86.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 2016. *Panduan Penulisan Usul dan Laporan Skripsi*. Bandar Lampung.
- Ghozali, Imam dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gomes, Ricardo C. and Stephen P. Osborne. 2010. *The Role of Stakeholders in Determining Local Government Performance: Evidence from Barzil*. Brasilia: University of Edinburgh.
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*. Boston: McGraw-Hill.
- Hadi, Waskito. 2010. "Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2007)". *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Badan Pemeriksa Keuangan. Vol. 3, No. 1.

- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2002. Analisis Varian Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, Jogiyanto. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman - Pengalaman*. Edisi 6. Yogyakarta: BPF E.
- Horne, James C. dan John M. W. Jr. 2005. *Fundamentals of Financial Management (Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Imawan, Riswanda dan Agus Wahyudin. 2014. "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012". *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang. 3 (2).
- Julitawati, Ebit. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh". *Jurnal Akuntansi*. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 1. No 1.
- Kusnandar, Dodik Siswanto. 2012. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal". *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Kusumawardani, Media. 2012. "Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia". *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang. 1 (1).
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maiyora, Gita. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera). *Jurnal Ekonomi*. Universitas Riau. Vol. 2. No. 2.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Masdiantini, Putu Riesty. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. 14.2 Februari.
- Mercy, Pricilia Suoth. 2013. "Kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bitung”. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 1. No. 3. Hal. 1203-1211.

Munawir. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan Keempat Belas. Yogyakarta: Liberty.

Mustikarini, Widya Astuti dan Fitasari, Debby. 2012. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007”. *Proceeding. Simposium Nasional Akuntansi 15*.

Nachrowi, N. D. & Usman, H. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.

Nandhya, Marfiana. 2013. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Sebelas Maret.

Nataluddin, Nirzawan dan Yuliati. 2001. *Potensi Dana Perimbangan Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi. Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.

Patrick, P. A. 2007. The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. *Unpublished Ph.D Dissertation*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.

Puspitasari, Ayu Febriyanti. 2013. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011”. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Brawijaya. Vol 1. No 2.

Riduwan. 2010. *Metode Teknik Menyusun Tesis*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta.

Ridwan dan Barlian. 2005. *Manajemen keuangan I*. Edisi Kelima. Cetakan Kedua. Jakarta: Literatur Lintas Media.

Riwu Kaho, Josef. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Rukmana, Wan Vidi. 2013. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Sekaran, Uma, Bougie, Roger. 2010. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. 5th Edition. Wiley.

Slyke, David M. Van. 2006. *Agents or Stewards: Using Theory to Understand The Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship*. Oxford University Press: Public Administration Research and Theory,

Inc.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Suhardjanto, D, Rusmin, Mandasari, Putriesti and Brown, Alistair. 2010. "Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities". *Journal Public Policy*.
- Suhardjanto, Djoko dan Rena Rukmita Yulianingtyas. 2011. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)". *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Universitas Sebelas Maret. 8(1):1-94.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah". *Media Riset Akuntansi*. Universitas Jenderal Soedirman. Vol. 1. No. 2.
- Susanto, Eliza Dewi dan Henny Murtini. 2015. "Karakteristik Pemerintah Daerah Pendorong Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Tengah". *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang. 4 (4).
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*. Cetakan Ketujuh. Yogyakarta: Ekoisia.
- Suyana Utama, Made. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Todaro, Michael P. 2000. *Economic Development. Seventh Edition*. New York: Addition Wesley Longman. Inc.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Wahyuningsih, Kristin dan Tanggulangan, Gustin. 2014. "Pengaruh Reputasi dan Ukuran Organisasi terhadap Kinerja Organisasi Nirlaba di Indonesia. *Seminar Nasional dan Call for Paper*. Universitas Kristen Satya Wacana. Hlm. 397-407.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. "Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal". *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.